

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan perkotaan yang manusiawi merupakan lingkungan perkotaan yang ramah bagi pejalan kaki yang mempunyai ukuran dan dimensi berdasarkan skala manusia (Nasution, M. Husni Thamrin; 2006). Upaya ke arah itu dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan pejalan kaki di kawasan perkotaan, terutama di kawasan pusat kota, yaitu merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang sesuai dengan karakteristik dan tuntutan kebutuhan pejalan kaki dengan tujuan untuk mempertahankan pusat kota agar tetap manusiawi, menarik bagi warga kota untuk datang, tinggal, bekerja, dan melakukan kegiatan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Walaupun pembuatan area pejalan kaki didedikasikan untuk manusia, terutama: para pejalan kaki. Kenyataannya berbeda, prasarana pejalan kaki lebih banyak beralih fungsi, sehingga pejalan kaki menjadi tergeser dari ruang yang seharusnya menjadi haknya.

Kota Bandung contoh kota besar di Indonesia yang memiliki masalah mengenai kawasan atau daerah dan fasilitas bagi para pejalan kaki. (<http://dbonny.blogspot.com/2011/01/penertiban-pkl-yang-tak-kunjung-usai.html>). Berbagai macam daya tarik baik di bidang pariwisata, kuliner dan pusat perbelanjaan membuat Bandung menjadi tempat yang mendapat banyak kunjungan. Pengunjung tidak hanya berasal dari daerah sekitar, seperti Jakarta. Akan tetapi, pengunjung banyak berasal dari luar negeri. Jika berkunjung ke kota-kota besar di dunia, maka salah satu ciri yang menarik dan membuat nyaman pendatang kenyamanan berjalan kaki untuk menikmati suasana dan keindahan kota tersebut. Keadaan tersebut tidak akan pernah di jumpai di Kota Bandung.

Denny Zulkaidi, Planolog Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung memiliki tata kota yang terbilang baik, hanya implementasinya yang buruk (<http://citizenmagz.com/?p=3555>). Menurut pengamatan Denny, Pemerintah Kota Bandung memiliki prinsip yang salah persepsi. Prinsipnya Kota Bandung merupakan Kota Jasa. Denny menerangkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memberikan izin untuk mendirikan usaha, yang menurut pemikiran Pemerintah Kota Bandung hanya bersifat musiman. Ternyata pemikiran itu salah sehingga lahan tempat komersil menjadi semakin banyak dan menumpuk. Lebih parah lagi tempat-tempat komersil ini disatukan dalam satu kawasan atau wilayah.

Pemerintah Kota Bandung mengabaikan hak-hak masyarakat untuk menikmati kota mereka. Motifnya diperkirakan ada tiga, pemerintah tidak sengaja, pemerintah kota memiliki tujuan sendiri namun merugikan orang lain, dan pemerintah terjebak dalam komersialisme.

Tempat komersil ini disatukan di satu wilayah, akibatnya dibutuhkan lahan parkir yang luas, karena lahan parkir yang tersedia tidak mencukupi, sehingga badan jalan dipakai untuk lahan parkir, dan Kota Bandung macet. Selain itu, kebutuhan lahan parkir ini pun turut merampas hak-hak pejalan kaki, trotoar yang seharusnya merupakan hak mereka.

Pertambahan volume kendaraan yang semakin tidak terkendali setiap harinya, mengakibatkan terlanggarnya hak pejalan kaki karena disfungsi trotoar oleh para pengendara motor yang melintasi trotoar untuk menghindari kemacetan. Keterbatasan sarana pejalan kaki menjadi kendala dalam hal ini, seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dibangun oleh pihak swasta tanpa memperhatikan kelayakan guna bagi para pejalan kaki (karena hanya untuk kepentingan pemasangan reklame), *zebra cross* yang sudah pudar dan tidak diletakkan di tempat-tempat yang memadai, alat bantu penyeberangan bagi pejalan kaki (baik yang bersifat visual maupun audio), dan masih banyak masalah lain yang berhubungan dengan masalah sosial.

Fenomena-fenomena terlanggarnya hak-hak pejalan kaki di atas membuat masalah perlindungan hukum bagi pejalan kaki di Kota Bandung menarik untuk diteliti. Penelitian pendahuluan diadakan sebagai langkah awal, untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan data dari Unit Penyidikan dan Rekayasa Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (Unit Dikyasa Polrestabes Bandung, informan: Brigadir Riki Iwan Permana) untuk mengetahui jalan mana saja yang disebut jalan protokol di Kota Bandung. Dari sekian banyak jalan protokol di Kota Bandung, maka didapatkanlah data jalan protokol untuk diteliti yang berkaitan dengan fasilitas pejalan kaki di Kota Bandung. Jalan-jalan protokol tersebut, yaitu: Jalan Merdeka, Jalan Cihampelas, Jalan Asia Afrika, Jalan Pasirkaliki, Jalan Pajajaran, Jalan Ahmad Yani di sepanjang pertokoan dan Terusnya, Jalan Braga, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Cipaganti. Data yang diperoleh adalah kondisi fasilitas pejalan kaki, seperti trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang. Dari daftar yang disebutkan ini dapat disimpulkan bahwa jalan protokol merupakan jalan-jalan utama di suatu kota atau wilayah, meskipun demikian umumnya jalan protokol lebih lazim digunakan di kota.

Jalan-jalan yang diteliti, yaitu: Jalan Merdeka, Jalan Cihampelas, Jalan Asia Afrika, Jalan Pasirkaliki, Jalan Pajajaran, Jalan Ahmad Yani di sepanjang pertokoan dan Terusnya, Jalan Braga, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Cipaganti, kondisi yang dijumpai, yaitu:

1. Kondisi trotoar yang tidak mulus/ rata, memerlukan manuver cukup banyak dari pejalan kaki untuk dapat melewatinya.
2. Perbaikan trotoar terkesan asal-asalan.
3. Tingginya undakan trotoar.
4. Lebar trotoar yang sempit.

5. Patokan trotoar yang tidak jelas, kadang-kadang tidak ada patokan trotar sama sekali, mengakibatkan pejalan kaki seringkali hampir bersinggungan dengan kendaraan yang melaju di badan jalan ketika berjalan.
6. Terdapat kotak-kotak terminal jaringan telekomunikasi milik PT. Telkom dan kotak-kotak terminal sirkuit listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).
7. Cat penanda marka jalan dan *zebra cross* sudah pudar.
8. Beberapa bagian jalan yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki terpotong oleh bagian muka hampir di semua pusat perbelanjaan di daerah tersebut.
9. Pohon, tiang listrik, penghijauan serta rambu-rambu yang terpasang seringkali menghalangi keleluasaan pejalan kaki.
10. Pedagang kaki lima menghalangi laju pejalan kaki.
11. Sering pejalan kaki terganggu oleh arus kendaraan yang keluar dan masuk pertokoan yang berada di sepanjang jalan.
12. Terdapat gundukan dan bungkusan sampah yang menghalangi pejalan kaki.
13. Seringkali saluran air di jalan-jalan tersebut mengeluarkan aroma tidak sedap.
14. Kurangnya fasilitas peneduh untuk melindungi pejalan kaki dari terik matahari yang menyengat maupun guyuran hujan.
15. Pohon-pohon difungsikan sebagai peneduh seringkali tumbuh terlalu besar dan merusak trotoar.
16. Dipergunakannya jalur trotoar sebagai lahan parkir gedung gedung di daerah tersebut.
17. Banyak kendaraan yang parkir atau berhenti tidak pada tempatnya, yang menghalangi laju pejalan kaki yang semakin tersisih.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, baik melalui wawancara, maupun observasi langsung ke lokasi-lokasi jalan protokol, maka dapat dilihat bahwa pejalan kaki seringkali menghadapi suasana tidak nyaman dan aman untuk melintas. Pejalan kaki perlu dilindungi

Ester, 2013

Perlindungan Hukum Pejalan Kaki Pada Jalan-Jalan Protokol Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hak-haknya oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, berdasarkan konstitusi negara Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan sebagai bagian yang integral dari masyarakat.

Melihat kondisi pejalan kaki di atas, penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif untuk memberikan rekomendasi alternatif solusi untuk penegakkan perlindungan hukum para pejalan kaki dan perbaikan fasilitas pejalan kaki di jalan-jalan protokol Kota Bandung. Salah satu alternatif solusi dengan adalah sosialisasi terus menerus mengenai hak dan kewajiban para pejalan dan seluruh warga pengguna jalan dan fasilitasnya oleh Pemerintah Kota Bandung beserta dinas yang terkait di dalamnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi bersama antara seluruh pihak yang berkepentingan dengan penggunaan, pengaturan, dan pemeliharaan jalan dan fasilitasnya. Diperlukan perubahan paradigma dalam pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya dan warga Kota Bandung pada khususnya, mengenai pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun kota dalam kaitannya dengan pendidikan demokrasi modern.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pejalan kaki merupakan bagian dari lalu lintas, penelitian awal membuktikan bahwa pejalan kaki di jalan-jalan protokol tidak dapat menikmati kondisi nyaman dalam menikmati moda transportasi ini. Dalam mengatasi hal ini, pihak-pihak berwenang seolah tidak dapat berbuat apa-apa dan terkesan membiarkan kondisi ini. Melihat dari kondisi di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan fasilitas pejalan kaki di jalan protokol tersebut?
2. Bagaimana kondisi fasilitas pejalan kaki di jalan protokol tersebut?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pejalan kaki?

Ester, 2013

Perlindungan Hukum Pejalan Kaki Pada Jalan-Jalan Protokol Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengadaan fasilitas pejalan kaki yang tertib dan teratur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah di atas, beberapa tujuan penelitian ini, meliputi :

1. Tujuan Umum
  - a. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pejalan kaki di jalan-jalan protokol perkotaan.
  - b. Mengetahui perbedaan antara peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai Peraturan Daerah dengan kenyataan yang terjadi.
  - c. Mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak teraturnya lalu lintas di Kota Bandung, termasuk pejalan kaki.
2. Tujuan Khusus
  - a. Mengetahui akar permasalahan yang mengakibatkan banyak terlanggarnya hak-hak pejalan kaki di Kota Bandung.
  - b. Mengetahui efektivitas peraturan-peraturan mengenai perlindungan pejalan kaki di Kota Bandung.
  - c. Mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak-pihak berwenang untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pejalan kaki.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Secara teoretik, penelitian ini menambah wawasan atau cakrawala saya mengenai perlindungan hak-hak pejalan kaki, latar belakang permasalahan yang mengakibatkan

terlanggarnya hak-hak tersebut dari pejalan kaki, dan kaitannya dengan studi Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara praktik, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi di antaranya:

1. Memperoleh data dan fakta tentang situasi yang dihadapi pejalan kaki di jalan-jalan protokol di Kota Bandung.
2. Sebagai sumbang saran pada berbagai instansi Pemerintah yang mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan pejalan kaki.
3. Sebagai upaya perbaikan fasilitas dan hak-hak pejalan kaki di Kota Bandung.

#### **E. Asumsi Penelitian**

Jalur pedestrian merupakan elemen penting dalam perancangan kota, karena tidak lagi berorientasi pada keindahan semata, akan tetapi juga pada masalah kenyamanan dengan didukung oleh kegiatan pedagang eceran yang dapat memperkuat kehidupan ruang kota yang ada. Sistem jalur pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota, meningkatkan penggunaan pejalan kaki, mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem perancangan yang manusiawi, menciptakan kegiatan pedagang kaki lima yang lebih banyak dan akhirnya akan membantu kualitas udara di kawasan tersebut. Selama ini pejalan kaki masih dianggap sebagai pengguna jalan kelas dua, melihat dari pembangunan sarana dan prasarana yang lebih banyak berpihak pada kendaraan bermotor.

Permasalahan yang dihadapi nampaknya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat, bukan hanya lemahnya penegakkan peraturan yang seharusnya melindungi pejalan kaki, namun banyaknya jalur pejalan kaki yang menyulitkan untuk dilalui menandakan perencanaan dan standar pembangunan yang tidak terencana maupun terpelihara dengan baik

Kesulitan yang dihadapi oleh pejalan kaki ini nampaknya tidak bisa lepas dari faktor-faktor pendukung, tidak hanya dari penegakkan peraturan dan standar regulasi, melainkan pembangunan kota secara keseluruhan, Kota Bandung pada saat ini terlalu berorientasi pada

**Ester, 2013**

Perlindungan Hukum Pejalan Kaki Pada Jalan-Jalan Protokol Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

komersialisme, pembangunan pusat-pusat perbelanjaan skala besar yang mengundang keramaian berhubungan erat dengan ramainya Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat, dibarengi dengan tingginya angka pertumbuhan kendaraan, tingginya tarif parkir di pusat-pusat perbelanjaan yang ada mengakibatkan pejalan kaki semakin terjepit diantara banyak tuntutan.

## **F. Struktur Organisasi Tesis**

Tesis ini terdiri atas lima bab. Bab I berisi pendahuluan, terdiri atas latar belakang penelitian, Identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi dari tesis.

Latar belakang membahas mengenai alasan mengapa masalah dalam tesis ini perlu diteliti, pentingnya masalah tersebut untuk diteliti dan pendekatan mengatasi masalah tersebut baik secara teoritis maupun secara empiris. Identifikasi dan perumusan masalah berisi rumusan dan analisis masalah berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian. Tujuan penelitian menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian dilakukan dan berhubungan dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan. Manfaat penelitian merupakan manfaat yang ingin diperoleh setelah penelitian dilakukan. Struktur organisasi tesis menjelaskan tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian dalam bab.

Bab II Kajian Pustaka dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka dalam tesis ini secara garis besar terdiri atas teori tentang pejalan kaki, teori hukum dan teori pendidikan kewarganegaraan. Penelitian terdahulu merupakan kesimpulan dari hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kajian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri atas kajian tentang situs penelitian, sumber data, instrumen penelitian, tahapan penelitian dan teknik analisis data. Situs penelitian adalah lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan, yang menjadi tempat dari sumber

**Ester, 2013**

Perlindungan Hukum Pejalan Kaki Pada Jalan-Jalan Protokol Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

data yang dikoleksi oleh peneliti. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Tahapan penelitian menjelaskan mengenai prosedur yang ditempuh oleh peneliti dalam proses penelitian dari mulai mengumpulkan data sampai dengan penarikan kesimpulan. Teknis analisis data berisi hal-hal yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data yang terkumpul sebelum data ini disajikan.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan. Pada bab ini disajikan pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Bagian pembahasan berisi diskusi tentang temuan tersebut yang dikaitkan dengan teori-teori pada bab dua. Pembahasan ini merupakan refleksi terhadap teori yang dikembangkan oleh peneliti atau penelitian sebelumnya.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan berhubungan dengan rumusan masalah pada bab satu, dimana kesimpulan ini berisi jawaban dari rumusan masalah. Saran berisi rekomendasi dari peneliti yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian yang bersangkutan dan kepada peneliti berikutnya.